



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS PRIYATMONO**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **454743**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.472.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/240 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 960 m2/800 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 19.999 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/100 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 140.000.000**

1. MOBIL, HONDA/JAZZ G03 1.5 MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 453.500.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.094.825.246**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

**Sub Total** **Rp. 7.160.325.246**



III. HUTANG

Rp. 291.462.987

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.868.862.259

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.